

## DPRD Depok Tolak Kenaikan Tarif Berobot Warga Miskin di Puskesmas

DEPOK (IM) - Peraturan Wali Kota Depok Nomor 64 Tahun 2023, tentang kenaikan tarif layanan pusat kesehatan masyarakat (puskesmas) di 11 kecamatan didesak untuk dicabut dan dibatalkan karena membebani warga, terutama kalangan kurang mampu.

Hal tersebut ditegaskan anggota DPRD Kota Depok, Nurhasim dan pimpinan DPRD Kota Depok, Hendrik Tangke Allo, Jumat (11/8).

Menurut Nurhasim, APBD Kota Depok sangat cukup memenuhi kebutuhan 11 puskesmas. "Maka itu tak perlu ada Perwali karena membebani rakyat kecil di Kota Depok," katanya.

Apapun alasannya, kata dia dalil-dalil Wali Kota untuk memungut biaya tambahan dari rakyat tak bisa diterima.

"Apalagi alasannya untuk mensejahterakan pegawai puskesmas," tambahnya.

Politisi Partai Golkar itu menambahkan tidak perlu menambah kesejahteraan aparat sipil negara puskesmas karena tiap bulan pegawai puskesmas menerima gaji dan tunjangan dari pemerintah. Wali Kota Depok, Muhammad Idris, sambungnya justru seharusnya membebaskan iuran-uran pengobatan masyarakat karena anggaran pengobatan sudah diakomodir di APBD.

"Pertanyaan saya adalah untuk apa lagi Pemerintah Kota menerbitkan perwali pungutan-pungutan pengobatan. Saya tidak setuju program pemerintah yang menyusahkan rakyatnya," tegas Nurhasim.

Pimpinan DPRD Kota Depok, Hendrik Tangke Allo dari Fraksi

PDI Perjuangan juga meminta Wali Kota Depok, Mohammad Idris untuk mencabut aturan tersebut. Sebab kenaikan tarif layanan puskesmas membebani warga, terutama kalangan kurang mampu.

Ia mengatakan Pemerintah Kota Depok seharusnya hadir untuk memberikan bantuan buat warganya. Apalagi yang berobat ke puskesmas. "Inikan kebanyakan adalah warga yang kurang mampu," ucapnya.

Hendrik juga menegaskan sudah seharusnya Pemkot Depok berpikir untuk meningkatkan layanan, bukan meningkatkan tarif untuk berobat.

Diketahui, kenaikan tarif pelayanan puskesmas hingga 500% berdasarkan terbitnya Perwali Depok Nomor 64 Tahun 2023 tentang Pedoman Umum dan Penetapan Tarif Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas pada Dinas Kesehatan Kota Depok.

Perwali berlaku sejak ditandatangani oleh Wali Kota Depok Mohammad Idris pada 31 Juli 2023 dan mulai berlaku pada 7 Agustus 2023. Kenaikan tarif layanan puskesmas di Kota Depok dari Rp2.000 naik Rp8.000 menjadi Rp10.000.

Kepala Dinas Kesehatan Kota Depok, Mary Liziawati mengatakan kenaikan tarif layanan puskesmas dari Rp2.000 menjadi Rp10.000, tidak berpengaruh kepada peserta BPJS Kesehatan. Sebab tarif bagi peserta BPJS sudah tercover.

"Tarif ini tidak memengaruhi peserta BPJS Kesehatan karena tidak dikenakan biaya (gratis), karena sudah dicover BPJS," ujar dia.

● yan

## Segera Pindahkan Jaringan Utilitas ke Bawah Tanah

JAKARTA (IM) - Untaian kabel fiber optik kembali memakan korban di Jalan KS Tubun, Slipi, Palmerah, Jakarta Barat, Rabu (9/8). Leher pengendara motor bernama Akbar (21) terjatet kabel yang putus di jalan tersebut.

Pengamat Tata Kota Universitas Trisakti, Nirwono Yoga menilai peristiwa berulang ini patut dijadikan momentum Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk membenahi kesemrawutan kabel di langit Ibu Kota.

"Kasus terjatetnya leher warga oleh kabel fiber optik harus menjadi momentum Pemprov DKI untuk mempercepat pemindahan seluruh sarana jaringan utilitas terpadu (SJUT) ke bawah tanah atau trotoar," ujar Nirwono saat dihubungi, Jumat (11/8).

Kata dia, Pemprov DKI bertanggung jawab menjamin keamanan dan keselamatan warga terhadap SJUT. Nirwono menekankan agar Pemerintah Daerah DKI Jakarta tidak lepas tangan ataupun hanya menyalahkan perusahaan pemilik kabel utilitas.

"Pemda DKI harus ikut bertanggung jawab sekaligus memberi sanksi tegas kepada perusahaan kontraktor utilitas atau kabel serat optik tersebut," ungkap Nirwono.

Nirwono kemudian mendorong agar Pemprov dan DPRD DKI Jakarta segera mengesahkan raperda SJUT. Padahal, raperda tersebut telah diajukan sejak tahun 2019. "Agar pelaksanaan pemindahan jaringan

utilitas ke bawah tanah atau trotoar bersamaan dengan kegiatan revitalisasi trotoar yang tengah dilaksanakan Dinas Bina Marga DKI. Dengan target pada 2030 seluruh SJUT sudah dipindah ke bawah tanah atau trotoar," jelas Nirwono.

Secara teknis, DPRD dan pemilik jaringan kabel utilitas setuju memindahkannya ke bawah tanah. Namun, pembahasan ini mandek pada biaya retribusi yang dikenakan untuk perusahaan pemilik kabel.

"Pembahasan terakhir fokus di penguasaan retribusi daerah yang selama ini tidak pernah dikenakan kepada pemilik kabel utilitas, mereka bayar biaya izin pemasangan saja," imbuh dia.

Hal ini, lanjut Nirwono disertai kewajiban pemindahan dan pemutusan kabel oleh perusahaan pemilik kabel. Ia juga mengusulkan, Pemprov DKI menggunakan biaya retribusi daerah untuk perawatan serta pemeliharaan SJUT agar tidak membebani APBD.

Diberitakan sebelumnya, Asosiasi Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi (Apjatel) akan merelokasi seluruh kabel fiber optik udara di DKI Jakarta mulai September 2023. Ketua Apjatel Jerry Siregar berkata, penataan kabel fiber optik ini merupakan kolaborasi anggota Apjatel bersama lima Suku Dinas Bina Marga di Jakarta dan Pemerintah Provinsi DKI. ● yan

**PENGUMUMAN**

Berdasarkan akta pernyataan keputusan pemegang saham PT. CAHYA WAJA ANUGRAH berkedudukan di Jakarta Barat no. 6 tgl 09 Agustus 2023, yg dibuat dihadapan Siti Masnurroh SH, Notaris di Jakarta, telah di setuju pengesahan Hasil Likuidasi dan Pembubaran Perseroan, kepada pihak yang berkepentingan mohon menghubungi Perseroan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal pengumuman ini.

Demikianlah diumumkan memenuhi ketentuan Pasal 147 UU 40/2007 ttg PT.

Horat Kami Direksi/Likuidasi

**PENGUMUMAN**

Bahwa berdasarkan Akta PT CHRISALENTA UTAMA, Tertanggal 11 Agustus 2023, Nomor 12, yang dibuat dihadapan MULYANI, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Karawang, telah diturunkan modal dasar perseroan dari sebesar Rp.15.000.000.000,- menjadi sebesar Rp.500.000.000,- dan modal disetor serta modal ditempatkan dalam perseroan dari sebesar Rp.13.000.000.000,- menjadi sebesar Rp.150.000.000,- bagi yang keberatan dapat mengajukan secara tertulis disertai alasannya kepada perseroan dan tembusannya disampaikan kepada Menteri Hukum Dan HAM RI U.P. Direktur Perdata, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak pengumuman ini.

Demikian pengumuman ini dibuat untuk memenuhi ketentuan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

Jakarta, Tanggal 12 Agustus 2023.

Direktur PT CHRISALENTA UTAMA

# 4 | Metropolis

FOTO/ANTARA



## PERBAIKAN SALURAN AIR DI JALAN OTISTA

Petugas menggunakan alat berat untuk pemasangan boks saluran drainase saat perbaikan saluran air di Jalan Otista Raya, Jakarta, Jumat (11/8). Perbaikan saluran air di beberapa titik itu untuk mengatasi aliran air yang tidak lancar dengan memperbaiki elevasi saluran dan menurunkan dasar saluran.

## PERBAIKI KUALITAS UDARA JAKARTA

# Penjabat Gubernur Heru Budi Bakal Bikin 23 Taman Baru Seluas 6,7 Hektare

Heru Budi mengatakan Pemprov DKI turut menggenapkan penanaman pohon yang dilakukan setiap Selasa atau Jumat. Terhitung sejak Oktober 2022 hingga Juli 2023, Dinas serta Suku Dinas Pertamanan dan Hutan Kota telah menanam sebanyak 10.474 pohon dan akan terus bertambah.

setiap Selasa atau Jumat. Terhitung sejak Oktober 2022 hingga Juli 2023, Dinas serta Suku Dinas Pertamanan dan Hutan Kota telah menanam sebanyak 10.474 pohon dan akan terus bertambah.

Dia mengatakan jumlah penanaman pohon dan tanaman hias yang dilaksanakan oleh lima Wilayah Kota Administrasi dan Kabupaten Kepulauan Seribu periode April-Juli 2023, yaitu sebanyak 55.345 pohon pelindung dan pohon produktif, serta 203.973 tanaman.

## Bangun 23 Taman Baru di 2023

Pada 2023, kata dia, Dinas Pertamanan dan Hutan Kota DKI Jakarta akan membangun 23 taman baru yang tersebar di lima wilayah Kota Administrasi dengan luasan mencapai 6,7 hektare.

Hal ini diharapkan dapat memberikan efek jangka panjang yang bermanfaat bagi udara dan lingkungan di Jakarta.

"Kondisi ini menjadi tantangan besar bagi kami di

JAKARTA (IM) - Penjabat Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono mengatakan Pemprov DKI akan melakukan berbagai upaya untuk memperbaiki kualitas udara Jakarta dan mengurangi sumber polusi.

Pada saat ini DKI telah mengganti bus-bus yang menghasilkan polusi tinggi dengan yang lebih ramah lingkungan dan menerapkan kebijakan ganjil genap. Termasuk kebijakan disinsentif tarif parkir bagi kendaraan yang tidak lulus uji emisi, pendataan kawasan, serta perluasan dan optimalisasi Ruang Terbuka Hijau (RTH).

udara Jakarta dipengaruhi oleh berbagai sumber emisi yang menyebabkan polusi," kata Heru Budi di Jakarta Pusat, Jumat (11/8).

Menurutnya, sumber emisi yang dimaksud berasal dari sumber lokal, seperti transportasi dan residensial maupun sumber regional dari kawasan industri yang lokasinya dekat dengan Jakarta.

"Pemprov DKI terus berupaya untuk memperbaiki kualitas udara di Jakarta melalui berbagai program," ujarnya.

Selain itu, Heru Budi mengatakan Pemprov DKI turut menggenapkan penanaman pohon yang dilakukan

Pemprov DKI Jakarta. Oleh karena itu, program-program yang sudah berjalan akan terus ditingkatkan," kata eks Wali Kota Jakarta Utara itu.

Heru Budi pun turut mengimbau seluruh warga untuk membantu dalam perbaikan kualitas udara di Jakarta dengan mulai beralih menggunakan transportasi umum yang saat ini sudah semakin banyak pilihannya, seperti Transjakarta, MRT, LRT, Mikrotrans.

"Itu silakan dimanfaatkan," ujar dia.

Menurut Kepala Sekretariat Preaiden itu, rencana perbaikan kualitas udara di Jakarta merupakan program jangka panjang yang harus terus dikawal penerapannya dan untuk sukseskannya, diperlukan sinergi dengan pemerintah daerah sekitar, yaitu Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Bodetabek).

"Sekali lagi, kami Pemprov DKI Jakarta akan terus berusaha melakukan yang terbaik untuk memperbaiki kualitas udara Jakarta," katanya.

Dalam beberapa hari terakhir, kualitas udara Jakarta masuk daftar kota terburuk di dunia. Pada Rabu lalu, pantauan kualitas udara Jakarta menurut situs IQAir dalam

kondisi tidak sehat pada pukul 05.00. Indeks kualitas udara (AQI) Jakarta pagi ini mencapai 160 dengan konsentrasi polutan utama PM2.5 sebesar 72 mikrogram per meter kubik.

Nilai ini membuat kualitas udara Jakarta menjadi yang terburuk di dunia di susul Johannesburg, Afrika Selatan (152), Beijing, Cina (152), Santiago, Cili (131), dan Lahore, Pakistan (112).

Sedangkan pagi ini, kualitas udara di Jakarta nomor dua terburuk di dunia per pukul 06.00 WIB berdasarkan pantauan situs IQAir. Indeks Kualitas Udara (AQI) Jakarta tercatat 176 poin atau masuk kategori tidak sehat dengan konsentrasi polutan utama PM2.5 sebesar 103 mikrogram per meter kubik.

"Konsentrasi PM2.5 di Jakarta saat ini 20,6 kali nilai panduan kualitas udara tahunan WHO," tulis keterangan di situs IQAir.

Particulate Matter (PM2.5) adalah partikel udara yang berukuran lebih kecil dari atau sama dengan 2,5 µm (mikrometer). Dengan kualitas udara Jakarta yang tidak sehat itu, IQAir menyarankan warga Jakarta memakai masker saat beraktivitas di luar rumah dan memasang penyaring udara. ● yan

## Dinkes DKI Klaim Kasus ISPA di Jakarta Terkait Peralihan Cuaca

JAKARTA (IM) - Dinas Kesehatan (Dinkes) DKI Jakarta mengklaim kasus Infeksi saluran pernapasan atas (ISPA) di Ibu Kota bukan disebabkan oleh polusi udara.

Kepala Seksi Surveilans, Epidemiologi dan Imunisasi Dinas Kesehatan DKI Jakarta, Ngabila Salama mengatakan peralihan cuaca menjadi penyebab utama kasus tersebut. "Iya benar (bukan karena polusi udara). Lebih pengaruh ke iklim," kata Ngabila, Jumat (11/8).

Ngabila menerangkan dampak polusi udara mayoritas lebih kepada penyakit kronis atau penyakit tidak menular seperti radang paru, PPOK, dan asma. Kemudian, penyakit sirkulasi darah seperti hipertensi dan jantung.

Dia mengatakan ISPA sering terjadi di musim hujan. "Jelas pengaruh paling kuat adalah kondisi pancaroba atau peralihan cuaca," kata

Ngabila.

Ia mengungkapkan sebanyak 100 ribu warga DKI Jakarta terjangkit ISPA setiap bulan. Kendati demikian, ia menyebut tak ada kenaikan kasus ISPA di Ibu Kota sejak April hingga Juli 2023.

"Hanya 0,9 persen warga DKI Jakarta terkena batuk pilek ISPA atau pneumonia setiap bulannya (rata-rata 100 ribu kasus dari 11 juta penduduk)," ungkapnya.

Ngabila menyampaikan penyakit ISPA paling banyak menjangkit pada Maret dengan 119.734 kasus. Sementara Januari ada 102.609 kasus, Februari ada 104.638 kasus, dan April ada 109.705 kasus. Kemudian, Mei ada 99.130 kasus serta Juni ada 102.475 kasus.

Oleh karena itu, Ngabila menyarankan agar masyarakat DKI Jakarta tetap mengenakan masker saat beraktivitas di luar ruangan gunaantisipasi penyakit ISPA. ● yan



FOTO: ANTARA

## Penjualan Pernak-pernik Kemerdekaan

Seorang pembeli memilih pernak-pernik hiasan kemerdekaan di Pasar Mester Jatinegara, Jakarta, Jumat (11/8). Pernak pernik hiasan untuk peringatan Hari Kemerdekaan ke-78 Republik Indonesia tersebut dijual mulai harga Rp5 ribu sampai Rp300 ribu per buah tergantung jenis dan ukuran.

**PENGUMUMAN**

Direksi PT Rajawali Medika Investama, berkedudukan di Jakarta Selatan ("Perseroan") mengumumkan bahwa Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham Perseroan, tertanggal efektif 9 Agustus 2023, telah menyetujui melakukan pengurangan Modal Ditempatkan dan Modal Disetor Perseroan sebesar Rp.7.900.000.000,- (tujuh miliar sembilan ratus juta Rupiah) dengan cara menarik kembali sejumlah saham Perseroan yang telah dikeluarkan secara sah oleh Perseroan, yaitu sejumlah 7.900 (tujuh ribu sembilan ratus) saham Perseroan dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta Rupiah) untuk dihapus.

Dalam jangka waktu 60 hari sejak tanggal pengumuman ini Kreditor Perseroan dapat mengajukan keberatan secara tertulis disertai alasannya kepada Perseroan dengan alamat di Rajawali Place, Lantai 30, Jalan H.R. Rasuna Said Kav B/4, RT. 003, RW. 007, Kelurahan Setiabudi, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan 12910, dengan tembusan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Demikian pengumuman ini dibuat untuk memenuhi ketentuan Pasal 44 ayat 2 Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Jakarta, 12 Agustus 2023

Direksi PT Rajawali Medika Investama